

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdullah, Rozali. 2010. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, S. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Effendy, Onong Uchjana. 2009. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. RemajaRosdakarya.

HR, Ridwan. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

----- . 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology : Ilmu Pemerintahan Baru 1 dan 2 / Oeh Taliziduhu Ndraha*. Jakarta: Rineka Cipta.

Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media Group.

Rosidin, Utang. 2019. *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah (Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)*. Bandung: Pustaka Setia.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

-----, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

-----, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

-----, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

-----, 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Solekhan, Moch.2012.*Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press.

Suryabrata.2013.*Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut UU Nomor 5 Tahun 1979*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

-----, 2003.*Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

-----, 2004. *Otonomi Desa (Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal :

Karyadijaya, Galih, Suwondo Dan Ike Wanusmawatie. 2013.Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 1(2) : 197-205.

Kustiawan, dan Zubaidah. 2017. Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintan Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 1(2): 118-152.

Ngarsiningtyas, Khoiriyah Situ dan Mustafa Sembiring. 2016. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*. 4(2): 161-174.

Prasetya, Ahadi Fajrin. 2016. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Fiat Justisia Journal of Law*. 10(3): 413-432.

Riska Kurniawan, Muhamad Nur. 2018. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Binabaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. *Jurnal JOM FISIP*. 5(1): 1-9.

Rodhiyah, Siti dan Muhammad Harir. 2015. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. 2(2): 291-300.

Setiawati. 2018. Peran Badan Permusyawaratan Desadalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. 5(1): 61-84.

Perundang-Undangan :

Naskah Rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Skripsi :

Achmad Muthali'in dan Abdul Choir, Suyatmi. 2012. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa. Karya Ilmiah (Skripsi).

Devi Isnaini Assegaf, Devi. 2017. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep. Skripsi.

Ritonga, Jainab. 2015. *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Tolang Dolok Kabupaten Tapanuli Selatan*. Skripsi. Medan: Universitas Negeri Medan.

Artikel/Internet :

Ester Juita Punu. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wiau-Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.
<https://media.neliti.com/media/publications/160494-ID-fungsi-badan-permusyawaratan-desa-bpd-da.pdf>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Peranan>

http://repository.radenintan.ac.id/1831/4/Bab_II.pdf

http://repository.upi.edu/2976/6/S_PSI_0901520_Chapter3.pdf

Muhammad Harzal. 2015. Kedudukan Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Di Desa Lepak Timur Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur).
http://eprints.unram.ac.id/4320/1/Jurnal%20ihzal_.pdf. Jurnal Ilmiah.

Wahidmurni. 2017. Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif. <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/2/1984.pdf>.

